

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah. Pembentukan BKD mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 34 A ayat (1)“Untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan yang dimaksud Pasal 34 A tersebut bahwa Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah” dan kemudian Keputusan Presiden RI. Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Secara kelembagaan (BKD) Provinsi Jawa Barat mempunyai persamaan dengan BKD yang terdapat di Provinsi lainnya yang ada di Indonesia, namun mempunyai perbedaan dalam Struktur Organisasi yang disebabkan oleh adanya kebutuhan organisasi pemerintahan, diantaranya mempunyai karakteristik yang berbeda dalam sisi penekanan Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya BKD adalah untuk menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Administrasi Kepegawaian, Pengawasan dan Pengendalian, Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Informasi Kepegawaian, merumuskan kebijaksanaan Kesejahteraan PNS serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani Kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu tugas pekerjaan kepegawaian di BKD Provinsi Jawa Barat yaitu mengelola data dan informasi kepegawaian, pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian, penyimpanan dan pemeliharaan data serta Dokumentasi Kepegawaian.

Sistem Informasi Kepegawaian merupakan salah satu kegiatan operasional yang penting pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. Namun, saat ini kegiatan operasional tersebut masih ditangani dengan sistem manual. Sehingga seringkali hal ini menyulitkan bagian Admin pegawai BKD jika ingin merekap data-data pegawai ataupun jika ingin menginput penilaian. Hal ini menyebabkan sering terjadinya disintegrasi data sehingga kurang efektif dan efisien, terutama dalam segi waktu dan tenaga.

Dari paparan diatas, Badan Kepegawaian Daerah ini membutuhkan sistem informasi yang dapat membantu dalam proses pengelolaan Data Informasi Kepegawaian. Sistem Informasi kepegawaian ini dibuat dengan harapan dapat membantu Staff Kepegawaian yang bertugas untuk mengelola data kepegawaian. Selain itu dapat memberikan informasi mengenai penilaian DP3 dan rekap data kepegawaian kepada user yang membutuhkan informasi tersebut. Karena itulah disusun penelitian tugas akhir ini dengan judul “Sistem Informasi Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Baerbasis Web” sebagai upaya solusi untuk memberikan informasi tentang BKD Provinsi Jawa Barat dan mempermudah user mengatasi permasalahan yang ada.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, didapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana membangun suatu sistem yang dapat menampilkan Rekapitulasi pegawai?
- 2) Bagaimana membangun suatu sistem yang dapat membantu pembuatan penilaian DP3 pegawai?
- 3) Bagaimana membangun suatu sistem yang dapat melakukan pengelolaan informasi tentang Kepegawaian pada BKD Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat menampilkan Rekapitulasi Pegawai berdasarkan : Pangkat, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Usia.
- 2) Dapat menampilkan penilaian DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai) berdasarkan : Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakasa, Kepemimpinan.
- 3) Dapat membangun sistem pengelolaan informasi kepegawaian yang bisa di implementasikan di BKD kota Bandung.

1.4 Batasan masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka pada proyek akhir ini ada beberapa batasan masalah dari Sistem ini, antara lain adalah:

- 1) Sistem Informasi ini berbasis web.
- 2) Hanya bisa diakses oleh Admin, Pegawai, Atasan Pejabat dan Pejabat Penilai yang ada di BKD Kota Bandung.
- 3) Sistem ini hanya menangani penilai (DP3) pada pegawai, tidak menangani penilaian pada pejabat penilai dan atasan pejabat penilai.
- 4) Sistem ini hanya bisa melakukan 1 masa penilaian.
- 5) Sistem ini hanya menangani penilaian pada data pegawai yang siap dinilai.

- 6) Penggunaan NIP pegawai yang diinputkan terdiri dari komponen Tahun Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Tanggal Pengangkatan PNS, Jenis Kelamin, dan Urutan Sistem.
- 7) Sistem ini Hanya menangani sistem informasi yang ada di BKD yaitu khusus untuk penginputan penilaian dan Rekap data pegawai.
- 8) Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *MySQL* sebagai databasenya.
- 9) Keamanan aplikasi ini ditangani hanya sebatas penggunaan username dan password untuk melindungi data pengguna serta data BKD

1.5 Metodologi penyelesaian masalah

Metodologi penyelesaian masalah dari aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1) Perumusan Masalah

Membuat suatu rumusan masalah yang terkait dengan pembuatan Sistem Informasi Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Berbasis Web.

2) Pengumpulan Bahan Studi Lapangan

Mengumpulkan data dan informasi dari pihak BKD Kota Bandung untuk digunakan sebagai *referensi* / acuan pembuatan sistem ini. Proses ini dilakukan untuk mengetahui sistem kerja dan proses bisnis sistem ini.

3) Studi Literatur dan Konsultasi

Salah satu metodologi penyelesaian masalah adalah studi literatur, yaitu pencarian dan pengumpulan literatur-literatur dan kajian yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terdapat pada Proyek Akhir ini. Literatur tersebut berupa artikel, buku referensi, internet, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah Proyek Akhir ini. Selain itu konsultasi dengan dosen pembimbing dan pihak BKD Provinsi Jawa Barat agar Proyek Akhir ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4) Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Aplikasi akan dibangun dengan model proses *Rapid Application Development* serta menggunakan UML untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan memodelkan sistem, proses tersebut melalui tahapan sebagai berikut :

a. Business Modeling

Pada fase ini dilakukan identifikasi mengenai informasi apa saja yang dibutuhkan proses bisnis, informasi apa saja yang dihasilkan, siapa yang membuat informasi tersebut, informasi itu dibutuhkan siapa saja, dan siapa yang memproses informasi tersebut.

b. Data Modeling

Memperjelas use case yang ada dan menentukan arsitektur sistem yang akan digunakan serta mengimplementasikannya sebagai perwujudan dari arsitektur sistem software. Membuat

detail rencana pelaksanaan proyek serta menghilangkan kemungkinan-kemungkinan terbesar yang memungkinkan timbulnya sebuah resiko. Setelah tahapan ini sudah dibuat arsitektur sistem yang dapat menyediakan fungsionalitas yang didukung sistem informasi.

c. Proses Modeling

Mengimplementasikan fungsi bisnis, deskripsi proses dibuat untuk menambah, modifikasi, penghapusan, atau pencarian objek data. Aliran aplikasi diatur oleh controller yang merupakan class yang fungsinya mengatur aliran aplikasi, dalam hal ini pengontrol model dan view.

d. Application Generation

Fase application generation diimplementasikan dengan penggunaan *framework PHP* dalam pembuatan aplikasi.

e. Testing and Reuse

Melakukan pengujian terhadap komponen-komponen yang telah dibuat, karena konsep MVC menggunakan kembali komponen yang sudah ada, maka beberapa komponen program telah teruji. Hal ini bisa mengurangi waktu pengujian secara keseluruhan, akan tetapi komponen harus tetap di uji.

5) Pengujian

Hasil dari perancangan sistem ini akan diimplementasikan melalui pengkodean menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dengan database yang digunakan adalah *MySql*. Setelah sistem selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah pengujian. Pengujian sistem ini langsung dilakukan pada user BKD Kota Bandung. Tahap pengujian ini dilakukan secara black box, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsionalitas-fungsionalitas yang terdapat dalam aplikasi ini. Pengujian secara black box ini dilakukan untuk melihat keluaran yang dihasilkan dari inputan, sehingga dapat diketahui kinerja dari aplikasi tersebut.

6) Penyusunan Dokumentasi

Menyusun dokumentasi program agar dapat digunakan pada tahap pengembangan selanjutnya. Penyusunan dokumentasi dilakukan seiring dengan pembuatan sistem ini. Dokumentasi akan diimplementasikan dalam bentuk buku proyek akhir

1.6 Sistematika Penulisan

Proyek akhir ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode penyelesaian masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II :Dasar Teori

Bab ini berisikan dasar teori yang digunakan untuk membangun Sistem Informasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yang meliputi web, PHP, dan proses bisnis *kepegawaian*.

BAB III :Analisis dan Perancangan Sistem

Pada bab ini akan dijelaskan analisis kebutuhan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan sistem saat ini sehingga bisa ditentukan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi pada perancangan Sistem Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

BAB IV :Implementasi dan Pengujian

Bab ini berisi tentang pengimplementasianrancangan pada tahap sebelumnya dan melakukan pengujian sistem baru.

BAB V :Penutup

Bab ini berisi kesimpulan serta saran dari penulis yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.